

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas tata ruang merupakan sebuah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola tata ruang di suatu wilayah. Tugas pokok dari Dinas tata ruang yakni memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pengembangan kawasan yang meliputi pengembangan kawasan khusus dan kerjasama pengembangan kawasan dan fungsinya yakni penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pengembangan kawasan, penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengembangan kawasan, pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan pengembangan kawasan, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengembangan kawasan, pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan kawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan kawasan, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pengembangan kawasan. Dengan adanya tupoksi Dinas tersebut seharusnya dapat mencegah terjadinya permasalahan yang diakibatkan penataan ruang yang tidak tepat dan pada akhirnya merugikan masyarakat.

Penataan Ruang di Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Baleendah belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat di lapangan yang seharusnya dalam

penataan ruang tersebut dijadikan ruang penghijauan, resapan air, dan drainase, tetapi malah dijadikan permukiman padat penduduk, banyaknya bantaran-bantaran sungai yang dibangun sehingga mengakibatkan sungai menjadi sempit. Selain itu dari berbagai pihak dalam pengendalian dan pengawasannya juga kurang sehingga tidak berjalan dengan baik sebagaimana fungsi dan tujuan dari penataan ruang itu sendiri. Demikian pula kinerja dari dinas tersebut belum efektif dengan terjadinya permasalahan banjir yang terjadi di kecamatan Baleendah, yang menyebabkan masyarakat harus mengungsi. Dalam penanganan banjir di Kecamatan Baleendah belum efektif dan efisien dikarenakan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Ini dapat dibuktikan dengan Penanganan Banjir secara fisik yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Banjir Daerah (BPBD) masih tidak efektif.

Sudah dilakukan berbagai upaya untuk penanganan Banjir diantaranya yaitu melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat tentang tata cara penanganan banjir di wilayah tertentu. Banjir tersebut diakibatkan karena meluapnya sungai Citarum yang diakibatkan adanya pendangkalan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, kurangnya resapan air, penghijauan, banyaknya sampah serta pengalihan aliran air dari hulu sungai ke anak yang terus menerus sehingga menimbulkan banjir dan longsor, selain itu banjir tersebut juga bisa diakibatkan dari topografi di daerah tersebut, dan masih kurangnya penataan ruang wilayah yang baik. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan pemerintah sangat berpengaruh demi terciptanya tata ruang wilayah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengawasan pemerintah terhadap

pegawai dinas yang bertugas mengawasi tata ruang wilayah terhadap penanganan banjir di Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Baleendah masih perlu ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan serta terjadinya banjir di wilayah tersebut teratasi, karena sejauh ini penanganan banjir di wilayah Kabupaten Bandung khususnya Baleendah dirasa belum efektif.

Dari latar belakang tersebut peneliti memperoleh data dari Dinas SDAPE (Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi) sebagaimana Tabel 1.1 mengenai Daftar Sebaran Luas Potensi Banjir Perkecamatan Secara Berurut Berdasarkan Rencana Pola Pengelolaan SDA DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum tahun 2016, dan Tabel 1.2 mengenai Daftar Sebaran Luas Potensi Banjir Per Sub Das (DAS Citarum Hulu) Berdasarkan Rencana Pola Pengelolaan SDA DAS Citarum. Salah satu daerah yang peneliti teliti di Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Baleendah. Luas Kecamatan Baleendah 4.255,54 Ha. Klasifikasi dan Luas Banjir sangat tinggi 502,10 Ha, tinggi 506,50 Ha, sedang 642,90 Ha. Total Luas Banjir 1.651,50. Dari Das Citarum tersebut, nama sub dasnya yakni Sungai Cisangkuy. Prosentase Luas Banjir Terhadap Luas Wilayah 38,81%. SUB DAS Cisangkuy Genangan Banjir 2010: Kecamatan Baleendah (200 Ha). Luas SUB DAS 280,95 Km². Panjang Sungai 18,80 Km. Klasifikasi dan Luas Banjir, Sangat Tinggi 206,70 Ha, Tinggi 669,00 Ha, Seding 1.390,90, Total Luas Banjir 2.266,60 Ha.

Dalam proses penataan ruang wilayah di Kabupaten Bandung Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) masih memakai landasan yang lama yakni Permen PU/PRT No. 20 Tahun 2011 tentang penataan ruang dan peraturan zonasi, dan belum memakai RDTR yang baru dikarenakan belum di Perdakannya. Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2008 berlaku 20 tahun.

Perencanaan tata ruang wilayah dikatakan baik atau tidaknya apabila dilihat dari penataan ruangnya sudah berjalan dengan baik atau tidak, dan penataan ruang yang baik dan benar adalah penataan ruang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan hingga saat ini permasalahan tersebut masih dirasa belum teratasi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Tata Ruang Wilayah terhadap Efektivitas Penanganan Banjir di Kabupaten Bandung.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka penulis dapat merumuskan bahwa permasalahan yang terjadi adalah:

1. Masih kurangnya penghijauan dan resapan air di Kabupaten Bandung khususnya di kecamatan Baleendah.
2. Terjadinya pendangkalan sungai yang mengakibatkan sungai Citarum meluap, dan banyaknya sampah sehingga mengakibatkan banjir.
3. Penataan wilayah belum sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka berikut ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh fungsi perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh manfaat perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pengaruh perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh fungsi perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh manfaat perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu yang didapat khususnya dalam ilmu Administrasi Publik.
- b. Membuka wawasan untuk mempertegas penggunaan teori .

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil pemahaman dari literatur yang ada diharapkan lebih memantapkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan serta sebagai masukan agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Juga untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi organisasi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan

(DISPERTASIH) Kabupaten Bandung khususnya dalam rencana tata ruang supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Arsyad (2012: 5) dalam buku yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Wilayah”, perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi di atas, Arsyad berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu:

1. merencanakan berarti memilih,
2. perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,
3. perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan
4. perencanaan berorientasi ke masa depan.

Hasibuan (2013: 248) dalam buku yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia”, perencanaan merupakan masalah memilih, yaitu memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada, tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada.

Pendapat di atas mengindikasikan bahwa perencanaan adalah kegiatan yang pertama-tama harus dilaksanakan sebelum aktivitas lainnya dilakukan.

Efektivitas Menurut Subkhi dan Jauhar (2013: 247) dalam buku yang berjudul “Pengantar Teori & Perilaku Organisasi” adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Ini berarti bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “efektivitas”. Bagaimanapun juga definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri, efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya:

1. Memiliki efek (pengaruhnya, akibatnya, kesannya).
2. Menggunakan metode/cara, saran/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Efektivitas menurut Mahmudi (2015: 86) dalam buku yang berjudul “Manajemen Kinerja Sektor Publik” menyatakan bahwa:

”Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

G. Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” (2015: 64) mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Skala pengukuran untuk kedua variable adalah *skala likert*, dan dicari korelasinya dengan menggunakan koefisien *Rank Sparman*, adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut:

1. $H_a : \rho = 0$, Artinya adanya pengaruh jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.
 $H_0 : \rho \neq 0$, Artinya tidak adanya pengaruh jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.
2. $H_a : \rho = 0$, Artinya adanya pengaruh fungsi perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.

$H_0 : \rho \neq 0$, Artinya tidak adanya pengaruh fungsi perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.

3. $H_a : \rho = 0$, Artinya adanya pengaruh manfaat perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.

$H_0 : \rho \neq 0$, Artinya tidak adanya pengaruh manfaat perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.

4. $H_a : \rho = 0$, Artinya adanya pengaruh perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.

$H_0 : \rho \neq 0$, Artinya tidak adanya pengaruh perencanaan tata ruang wilayah terhadap efektivitas penanganan banjir di Kabupaten Bandung.

